



The Analysis of Stakeholders Role's in the Children Under-five Years Nutrition Program in Kampar Health Center

Analisis Peran Stakeholder Dalam Program Gizi Pada Balita Di Puskesmas Kampar

Kartini¹, Kiswanto², Ahmad Hanafi³, Nurmainun⁴, Novita Rany⁵

^{1,2,3,4,5} STIKes Hang Tuah Pekanbaru

ABSTRACT

Stakeholders have an impact on reducing the number of malnutrition in children under five years. Riau Province is in the 20th ranks with the percentage of malnutrition as 4.20% and the percentage of malnutrition as 14%. Data from the Kampar District Health Office in 2018 found that Kampar Health Center had the highest number for malnutrition in children under five years with a percentage of 1.6% or amount 33 children. This study aims to obtain in-depth information about the role of stakeholders in the children under-five years of nutrition program Kampar Health Center in 2019. This was a qualitative study with Rapid Assessment design. Data collecting were used in-depth interviews, observation, and literature document. The number of informants was 10 people there were 5 people as the main informant and 5 people as supporting informants. The results found that stakeholders have exercised their power following their main duties, functions, and roles, only that the workload has not been evenly distributed, and still a lack of cooperation with development business partners. It was concluded that power has been going well according to the role and function. It is recommended to Health Center to improve the cooperation with several business development partners to achieve the goal of a nutrition program of children under five years. Besides, Health Center should be able to analyze the workload of employees, be able to analyze the needs of Human Resource, and establish cooperation with development business partners.

ABSTRAK

Stakeholder sangat berpengaruh dalam upaya pencegahan terjadinya masalah gizi pada balita. Provinsi Riau menempati posisi ke 20 dengan persentase gizi buruk sebanyak 4,20% dan persentase gizi kurang sebanyak 14%. Data dinas kesehatan kabupaten kampar tahun 2018 didapatkan Puskesmas Kampar menempati angka tertinggi untuk masalah gizi kurang pada balita dengan persentase 1,6% atau sebanyak 33 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang peran stakeholder dalam program gizi pada Balita di Puskesmas Kampar tahun 2019. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan desain penelitian rapid assesment. Prosedur pengambilan data dengan wawancara langsung secara mendalam, observasi dan penelusuran dokumen. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, yakni 5 orang sebagai informan utama dan 5 orang sebagai informan pendukung. Hasil penelitian diperoleh bahwa kepala Puskesmas, pemegang program gizi (stakeholder) telah menjalankan kekuasaannya sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan perannya. Hanya saja pembagian beban kerjanya yang belum merata serta masih kurangnya kerjasama dengan mitra usaha pembangunan. Kesimpulan penelitian ini adalah komponen kekuasaan, posisi serta pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan peran dan fungsi. Diharapkan kepada kepala Puskesmas untuk melakukan analisis jabatan serta kebutuhan sumber daya manusia Puskesmas, serta menjalin kerjasama dengan berbagai mitra usaha pembangunan dalam rangka meningkatkan lagi program gizi pada balita. Disarankan kepada pihak Puskesmas agar dapat menganalisis beban kerja pegawai, dapat melakukan analisis kebutuhan Sumber Daya Manusia dan menjalin kerjasama dengan mitra usaha pembangunan.

Keywords : Nutrition for Toddlers Program, Health Center, Stakeholders.

Kata Kunci : Program Gizi Pada Balita, Puskesmas, Stakeholder.

Correspondence : Kartini

Email : kartiniega8@gmail.com , 0852 6386 5311

• Received 30 Juni 2020 • Accepted 24 September 2020 • p - ISSN : 2088-7612 • e - ISSN : 2548-8538 •

DOI: <https://doi.org/10.25311/keskom.Vol6.Iss2.541>

Copyright ©2017. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative

Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

which permits unrestricted non-commercial used, distribution and reproduction in any medium

PENDAHULUAN

Balita merupakan kelompok umur yang rentan terhadap kelainan gizi karena pada saat ini mereka membutuhkan nutrisi yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu juga balita sangat pasif terhadap asupan makannya sehingga balita akan sangat bergantung pada orang tuanya. Balita yang mengalami kekurangan gizi akan lebih rentan terhadap suatu penyakit diantaranya adalah kurang energi dan protein (KEP), anemia, xerophthalmia, serta meningkatkan keparahan dan durasi penyakit yang dapat memperbesar risiko kematian (Lisang, 2017).

Angka gizi buruk sampai saat ini masih tinggi dan menjadi fokus perhatian dunia. Menurut data yang didapat dari Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan bahwa terdapat sekitar 870 juta orang dari 1,7 miliar penduduk dunia atau 1 dari 8 orang penduduk dunia menderita gizi buruk. Sebagian besar (sebanyak 852 juta) diantaranya tinggal di negara berkembang. Selain itu, menurut World Health Organization (WHO, 2012) jumlah penderita gizi kurang di dunia mencapai 104 juta anak dan keadaan gizi kurang masih menjadi penyebab sepertiga dari seluruh penyebab kematian anak di seluruh dunia (Risksdas, 2013).

Agar tercapainya percepatan perbaikan gizi ini dibutuhkan dukungan lintas sektor dan implementasi kebijakan aspek yang erat hubungannya dengan program gizi, yaitu klasifikasi dan partisipasi stakeholder. Istilah Stakeholder digunakan untuk mendeskripsikan komunitas atau organisasi yang secara permanen menerima dampak dari aktivitas atau kebijakan, dimana mereka berkepentingan terhadap hasil aktivitas atau kebijakan tersebut (Yuliansyah, 2016).

Analisis stake holder adalah sebuah proses dari penggabungan dan analisis kualitatif secara sistematis untuk mengetahui kepentingan siapa saja yang harus dipertimbangkan ketika menyusun, mengembangkan atau melaksanakan suatu kebijakan atau program. Analisis stakeholder merupakan sebuah teknik untuk mengurutkan dalam rangka melakukan pemetaan dan pemahaman kekuasaan, posisi, dan sudut pandang dari para stakeholder yang memiliki kepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut, dan atau mereka yang dipengaruhi oleh kebijakan tersebut dan menjadi bagian dari penyusunan kebijakan tersebut (Yuliansyah, 2016). Stakeholder dalam penelitian ini adalah Kepala Puskesmas Kampar, Petugas Gizi, Dokter Poli Anak, Perawat Poli Anak dan Bidan Desa Ranah Singkuang yang ada di Puskesmas Kampar.

Provinsi Riau menempati posisi ke 20 dengan persentase gizi buruk sebanyak 4,20% dan persentase gizi kurang sebanyak 14%. Data dinas kesehatan kabupaten kampar tahun 2018 didapatkan Puskesmas Kampar menempati angka tertinggi untuk masalah gizi kurang pada balita dengan persentase 1,6% atau sebanyak 33

orang

Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan pada petugas gizi yang ada di Puskesmas Kampar, penanggulangan gizi buruk pada anak balita belum berjalan dengan optimal. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menggalang dukungan dan komitmen politik dari Pemerintah Kabupaten Kampar serta berbagai stakeholder lokal lainnya untuk kesinambungan program Gizi Balita. Mulai dari kegiatan-kegiatan yang bersifat formal dalam program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) seperti sosialisasi dan advokasi program Gizi melalui berbagai pertemuan dan penyusunan rencana, hingga yang bersifat nonformal melalui lobbying. Upaya yang dilakukan belum memperlihatkan hasil sebagaimana yang diharapkan, dimana lokasi anggaran untuk program gizi balita yang bersumber dari APBD sangat minim. Program Gizi Balita menunjukkan belum menjadi salah satu agenda politik penting dan prioritas dalam penganggaran di Kabupaten Kampar. Hal ini menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian tentang peran stakeholder dalam program gizi balita.

METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan desain Rapid Assesment Prosedur yaitu cara penelitian cepat untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang hal apa saja yang melatar belakangi perilaku kesehatan masyarakat dalam waktu yang relatif singkat. Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Kampar yang memiliki fungsi dalam pelayanan kesehatan masyarakat tepatnya di Desa Ranah Singkuang pada bulan Juli – Agustus 2019.

Informasi diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam terhadap informan dan melakukan observasi dan penelusuran dokumen. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 (sepuluh) orang dimana terdapat informan utama sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari Kepala Puskesmas Kampar, pemegang program gizi di Puskesmas Kampar, 1 dokter di poli anak, 1 perawat di poli anak, dan 1 bidan desa. Informan pendukung sebanyak 5 (lima) orang yaitu Kepala Desa Ranah, ketua PKK, 1 orang kader kesehatan, 1 orang tokoh masyarakat, dan 1 orang ibu balita dengan status gizi kurang (Bhandari, 2016).

Setelah informasi didapat maka akan dimasukkan kedalam matriks informasi Stakeholder sehingga mempermudah analisis dan mereview Stakeholder serta melakukan trinagulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi data.

HASIL

Peranan stakeholder yang sesuai yaitu komponen kekuasaan, posisi serta pelaksanaan tugas sesuai dengan peran dan fungsi. Komponen lain dalam penelitian ini (minat atau kepentingan) belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan hasil wawancara mendalam kepada informan utama, didapatkan informasi bahwa

implementasi kekuasaan dalam program penanggulangan masalah gizi sudah cukup berdasarkan hasil wawancara dan observasi kegiatan pada program penanggulangan masalah gizi, penemuan kasus gizi balita dengan cara menunggu pasien yang datang ke poli anak dengan keluhan, tanda dan gejala yang mengarah pada kasus gizi buruk. Untuk penemuan kasus balita gizi buruk secara dini dalam pelaksanaannya petugas penanggung jawab program bekerja sama dengan bidan desa. Untuk evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan pelaksanaan kegiatan pada program gizi pada balita di puskesmas Kampar masih bertumpu pada bidan di desa melalui kegiatan posyandu. Untuk meningkatkan kemitraan dengan mitra pembangunan, dunia usaha dan lembaga sosial kemasyarakatan pada program gizi pada balita, masih sulit. Belum ada bentuk kemitraan dengan dunia usaha terbukti tidak ada dokumen kerja sama. Selama ini kemitraan hanya dengan BKKBN dan desa. Stakeholder internal harus menjalankan perannya karena merupakan bagian tupoksi kerja, sedangkan untuk stakeholder eksternal bersifat sukarela artinya tidak ada kewajiban

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan, didapatkan informasi bahwa implementasi minat kerjasama antara mitra pembangunan untuk menjamin efisiensi bantuan yang diberikan pada program gizi pada balita masih sebatas dengan kader dan ibu PKK. Hasil observasi peneliti yang dilakukan terhadap Puskesmas Kampar peneliti menilai bahwa stakeholder internal yaitu Kepala Puskesmas dan pemegang program gizi sampai dengan stakeholder eksternal yaitu Kepala Desa dan Ketua PKK adalah stakeholder yang paling penting dan paling berpengaruh dalam pelaksanaan program gizi balita. Dilihat dari minat dan kepentingannya, Stakeholder ini menganggap permasalahan gizi balita memang menjadi prioritas utama yang harus segera ditangani. Tidak tampak adanya kepentingan lain dari stakeholder selain untuk meningkatkan status gizi balita di wilayah kerja Puskesmas Kampar. Hasil penelusuran dokumen, dalam RUK Puskesmas Kampar untuk tahun 2018 tampak banyak usulan kegiatan yang berhubungan dengan gizi balita sehingga penganggaran dana juga sudah banyak yang dialokasikan untuk mendukung program gizi di Puskesmas Kampar.

Hasil wawancara terhadap informan diketahui bahwa seluruh stakeholder memberi manfaat kepada pelaksanaan program gizi balita baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga secara prinsip semua stakeholder berposisi mendukung dalam program gizi yang ada di Puskesmas Kampar. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, tampak stakeholder internal dan eksternal melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan gizi balita seperti penimbangan, penyuluhan, pembagian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), Posyandu rutin, penggerakan kader dan masyarakat desa dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa seluruh stakeholder mendukung program gizi balita yang dibuat oleh Puskesmas Kampar. Hasil

penelusuran dokumen peneliti bisa melihat adanya laporan kegiatan yang disampaikan oleh pemegang program gizi dan bidan desa kepada Kepala Puskesmas untuk setiap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan gizi.

Rincian aktivitas di puskesmas Kampar dilaksanakan dalam bentuk uraian tugas pokok, fungsi dan wewenang setiap pegawai. Pembagian pekerjaan ini dilakukan di awal tahun melalui loka karya mini yang kemudian ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Puskesmas. Termasuk didalamnya surat keputusan petugas yang berkaitan dengan program penanggulangan gizi buruk. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dan observasi berupa dokumen notulensi loka karya mini dan surat keputusan kepala Puskesmas tentang tugas pokok, fungsi dan wewenang penanggungjawab program di Puskesmas Kampar. Uraian tugas berupa kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai petugas yang berkaitan dengan program gizi buruk sudah dibuat sesuai dengan Standar Operating Prosedur (SOP) tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan SOP tersebut. Peran dunia usaha untuk memperbaiki keadaan gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak baduta melalui penerapan CSR sesuai dengan peraturan yang berlaku pada program gizi balita sudah ada, akan tetapi belum efektif.

PEMBAHASAN

1. Kekuasaan

Penelitian menggambarkan hasil bahwa kekuasaan telah berjalan dengan baik, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya. Hanya saja ada beberapa petugas yang bekerja melebihi dari beban kerjanya seperti yang diungkapkan oleh pemegang program gizi dan bidan desa. Miriam (2008) menyatakan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku. Pertama pemahaman tentang orang yang memperoleh kekuasaan dan kedua pemahaman tentang orang yang dikuasai dan tunduk pada kekuasaan. Penelitian yang dilakukan Suhartini (2015) menerangkan bahwa kekuasaan sangat berpengaruh terhadap kinerja seseorang dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya. Jadi semakin baik seseorang dalam melaksanakan kekuasaannya maka kinerja seseorang akan lebih optimal sehingga program kerja yang dijalankan dapat berjalan dengan optimal.

2. Minat dan Kepentingan

Berdasarkan hasil penelitian minat dan kepentingan dalam menjalin kerjasama antara mitra pembangunan untuk menjamin efisiensi bantuan yang diberikan pada program gizi pada balita masih belum dijalankan dengan optimal. Orientasi mitra berbeda dengan puskesmas, dimana mitra usaha melakukan upaya marketing sedangkan puskesmas melakukan upaya pencegahan dan pengobatan.

Ahmadi (2003) menyatakan bahwa minat adalah suatu keinginan yang timbul dari suatu perhatian seseorang terhadap barang, benda atau dapat juga dikatakan dorongan ingin melakukan kegiatan tertentu. Minat akan berjalan dengan baik apabila memiliki tujuan yang sama. Kepentingan adalah suatu tindakan individu atau kelompok yang mendorong manusia kepada beberapa tingkatan yang mendasar. Kepentingan bersifat tetap berlandaskan hukum dan moral tertentu dalam memilih dan memutuskan yang berpengaruh terhadap suatu objek tertentu berdasarkan tingkat kebutuhan yang paling diutamakan oleh individu atau kelompok. Penelitian Asiati dan Nawawi (2016) yang menyatakan bahwa kerjasama akan berjalan dengan baik apabila pihak yang diajak bekerjasama mempunyai tujuan yang sama, sehingga apabila masing-masing pihak tidak mempunyai tujuan yang sama maka kerjasama tidak akan berjalan dengan optimal.

3. Posisi

Berdasarkan hasil penelitian tentang posisi dalam mengembangkan rencana nasional dan menetapkan sasaran yang ingin dicapai pada program gizi pada balita telah dilakukan dengan cara bekerjasama dengan desa, perangkat-perangkat desa serta bidan desa. Hasil observasi menggambarkan telah dilakukan terdapat daftar rencana kegiatan penyuluhan di posyandu maupun kegiatan yang ada di masyarakat seperti wirid pengajian, rapat desa, dan bina keluarga balita.

Pujangkoro (2004) bahwa posisi atau kedudukan adalah suatu jabatan seseorang dalam suatu struktur organisasi yang memiliki tugas pokok, fungsi dan wewenangnya masing-masing. Dimana setiap posisi mempunyai program kerja yang harus dicapai yang telah disesuaikan dengan rencana pembangunan tiap-tiap program yang kemudian dilakukan evaluasi kerja. Suyatman (2017) yang mengatakan bahwa banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan atau mengembangkan sarana yang ingin dicapai agar tidak adanya lagi masalah gizi kurang pada balita, salah satunya dengan memberi pemahaman kepada orang tua bagaimana cara pemberian makanan yang bergizi pada balita dan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan bagi balita.

4. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peran dan fungsi

Penelitian mendapatkan informasi bahwa pelaksanaan tugas telah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, dimana petugas telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat keputusan dari kepala puskesmas. Informasi ini ditunjang oleh bukti fisik adanya pembagian tugas pokok, fungsi dan perannya sesuai dengan surat keputusan dari Kepala Puskesmas Kampar.

Himawan (2004) yang mengatakan tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggungjawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas pokok sebagai atau kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan

oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu. Bastian (2014) pembagian kerja adalah menggambarkan apa yang harus dikerjakan, bagaimana urutan-urutannya, siapa yang menanganinya dan kapan harus diselesaikan. Seseorang akan melakukan suatu pekerjaan dengan optimal jika sesuai dengan peran dan fungsinya.

Peran stakeholder sangat penting dalam menjalankan kebijakan program gizi pada balita di Puskesmas. Kebijakan program yang diatur dalam pedoman penanganan gizi pada balita harus didukung dengan adanya pembagian kerja yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing petugas, selain itu agar berjalannya program gizi pada balita secara optimal perlunya adanya dukungan dari berbagai lintas sektoral seperti pemerintah daerah, desa dan mitra usaha.

Dengan adanya kerjasama antar lintas sektoral maka kebijakan program dalam penanganan gizi pada balita dapat dilaksanakan secara optimal. Dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya meningkatkan kinerja program dalam mengurangi angka malnutrisi pada balita.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam dua bagian meliputi peranan stakeholder yang sesuai yaitu komponen kekuasaan, posisi serta pelaksanaan tugas sesuai dengan peran dan fungsi. Komponen lain dalam penelitian ini (minat atau kepentingan) belum berjalan dengan optimal. Diharapkan kepada kepala Puskesmas untuk melakukan analisis jabatan serta kebutuhan SDM puskesmas, serta menjalin kerjasama dengan berbagai mitra usaha pembangunan dalam rangka meningkatkan lagi program gizi pada balita.

Konflik Kepentingan

Dalam penelitian ini tidak ada konflik kepentingan.

Ucapan Terima Kasih

Jika diperlukan ucapan terima kasih dapat diberikan kepada 1) Seluruh Kepala Puskesmas dan staf puskesmas yang terlibat di Kabupaten Kampar 2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar beserta staf, 3) keluarga yang memberikan dukungan material dan imaterial kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu (2003). Psikologi Umum. Jakarta. PT Rineka Cipta
- Asiati, Devi & Nawawi (2016). Kemitraan Di Sektor Perikanan Tangkap: Strategi Untuk Kelangsungan Usaha Dan Pekerjaan. Jurnal kependudukan Indonesia. LIPI

- Bastian, W., Achmad, S.S., Baheram, M. (2014). Pengorganisasian PKBM sari Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Program Studi Pendidikan Luar Sekolah FKIP Universitas Riau Pekanbaru.
- Bhandari, N, Bhusal, dd.(2016). Quality of life of patient with hipertension in Kathmandu.internasional journal of nursing sciences, 3 (4), 379-384.<http://doi.org/10.1016/j.ijnss.2016.10.002>
- DinasKesehatanKabupaten Kampar. Laporan Status Gizi Kabupaten Kampar tahun 2016.. Kampar: DinasKesehatanKabupaten Kampar, 2016.
- Himawan, Muammar (2004). Pokok-pokok Organisasi Modern.Jakarta. Bina Ilmu
- Kemenkes RI. Rencana kerja pembinaan gizi masyarakat tahun 2013. 2013. Jakarta : Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
- Lisang, Amran Gatah (2017). Implementasi Program Penanggulangan Gizi Buruk Pada Anak Bawah Lima Tahun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. E Journal Katalogis, Volume 5 Nomor 2 Februari 2017 Halaman 14-25 ISSN 2302-2019
- Miriam, Budiarto. (2008). Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pujangkoro, Sugih Arto (2004). Analisis Jabatan (Job Analysis). Jakarta. Menara Ilmu
- Rizky I. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gizi Buruk Balita di Jawa Tengah dengan Metode Spatial Dubrin Model. Jurnal Gaussian; 2013; 20(5)
- Siswanti, dkk (2016). Peran Pendampingan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Program Pendampingan Keluarga Balita Gizi Buruk di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Tesis Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Wacana– Vol. 19, No. 3 (2016) ISSN : 1411-0199. Surabaya
- Suhartini. Y. (2015). Pengaruh Pengetahuan, Keterampilan, dan Kemampuan Karyawan terhadap Kinerja Karyawan. Universitas PGRI, Yogyakarta.
- Suyatman, Billy, dkk. 2017. Faktor Risiko Kejadian Gizi Kurang Pada Balita (Studi Kasus di Wilayah Kerja Puskesmas Bandarharjo Kota Semarang). Jurnal Kesehatan Masyarakat UNDIP.
- Yuliansyah, Mohammad Alfian, dkk (2016). Analisis Stakeholder Dalam Kebijakan Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Jember. E Jurnal Pustaka Kesehatan Volume (4) No 1 Januari 2016.